

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa

Karningsih Karningsih

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Korespondensi penulis: karningsih3224@gmail.com*

Abstract. Regulations in the history of Village regulation, starting with the establishment of regulations regarding Villages, namely the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, have given new enthusiasm to the community who have sometimes been spectators in development in the region. The community is given the authority to recognize their rights of origin (recognition), determine local scale authority and make local decisions for the benefit of the village community (subsidiarity), diversity, togetherness, mutual cooperation, kinship, deliberation, democracy, independence, participation, equality, empowerment and sustainability. In its implementation, especially regarding, among other things, the position of customary law communities, democratization, diversity, community participation, as well as progress and equitable development, there are still shortcomings, giving rise to disparities between regions, poverty, and socio-cultural problems that can disrupt the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, becoming an issue that interesting. This research method is a quantitative method with an explanatory research type. The sampling technique is systematic random sampling using an ordinal method, to determine the influence of each variable using the product moment hypothesis test, showing that there is an influence of the village head's leadership and community participation on the utilization of village funds.

Keywords: Leadership, Participation, Community, Village Funds,

Abstrak.Regulasi dalam sejarah pengaturan Desa, dimulai dengan ditetapkan pengaturan tentang Desa, yaitu berlakunya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan gairah baru bagi masyarakat yang selama ini kadang kala menjadi penonton dalam pembangunan di daerah. Masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal - usul (*rekognisi*), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (*subsidiaritas*), keberagaman, kebersamaan, kegotong - royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Dalam pelaksanaannya, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan masih terdapat kekurangan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi *issue* yang menarik. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan tipe penelitian eksplanatory, Teknik pengambilan sampel dengan sistematik random sampling dengan cara ordinal, untuk mengetahui pengaruh dari masing - masing variable dengan menggunakan uji hipotesis product moman, menunjukkan ada pengaruh kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa

Kata kunci : Kepemimpinan, Partisipasi, Masyarakat, Dana Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenang dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar besarnya pada pembangunan di pedesaan. ada dua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan desa yaitu masyarakat dan pemerintah. Hak dalam melaksanakan pembangunan desa juga diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,

* Karningsih Karningsih, karningsih3224@gmail.com

menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman, industri dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Urusan pemerintah yang diselenggarakan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, dan pasar desa.

Tujuan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dengan harapan menggabungkan konstruksi yaitu fungsi self goverment community dengan local self goverment, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal - usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan melalui Dana Desa tersebut.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri - ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Variabel dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan kepala desa , Partisipasi Masyarakat , Pemanfaatan Dana Desa . Teknik Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan sistematis random sampling, dengan cara

ordinal. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan studi Pustaka.

Asisten Untuk berbagi Parafrese Menulis kembali Menterjemahkan PDF Doc
Salinan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan merupakan ujung tombak organisasi yang mengarahkan orang-orang dan mendayagunakan sumber-sumber lain demi kepentingan organisasi. Faktor penting dalam kepemimpinan yakni dalam mempengaruhi atau mengendalikan pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain adalah tujuan dan rencana. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain atau kelompok dalam situasi tertentu agar mereka dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu.

- a) Adanya seseorang pemimpin,
- b) Adanya Pengikut,
- c) Adanya maksud dan tujuan yang hendak dicapai,
- d) Situasi tertentu (Lingkungan), dan
- e) Kemampuan mempengaruhi

Pengertian Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya. Definisi yang tersebut mencakup tiga elemen yaitu:

1. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi(Relational concept). Kepemimpinan hanya ada dalam proses relasi dengan orang lain (Pengikut). Apabila tidak ada pengikut, maka tidak ada pemimpin.
2. Kepemimpinan merupakan suatu proses agar bisa memimpin, pemimpin harus melakukan sesuatu.
3. Kepemimpinan harus membujuk orang orang lain untuk mengambil tindakan.

Pemimpin membujuk pengikutnya melalui berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (Menjadi teladan), Penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi dan mengkomunikasikan visi.

Kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan tugas dari anggota kelompok/masyarakat. Ada tiga implikasi yang penting dari definisi diatas yakni: pertama, kepemimpinan harus melibatkan orang lain,

bawahan atau pengikut. Kedua, kepemimpinan melibatkan distribusi yang tidak merata dari kekuasaan diantara pemimpin dan anggota kelompok. Ketiga, selain secara sah dapat mengarahkan bawahan atau pengikut mereka, pemimpin juga dapat mempunyai pengaruh. faktor - faktor yang mempengaruhi kepemimpinan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor genetis
- b. Faktor sosial
- c. Faktor bakat

Kepala desa sebagai Seorang pemimpin dalam melaksanakan peran- peran kepemimpinan antara lain Meliputi :

1. Kepala Desa sebagai Katalisator
2. Kepala Desa sebagai Fasilitator
3. Kepala Desa sebagai Pemecah masalah
4. Kepala Desa sebagai Komunikator Peran pemimpin

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka.

Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

3. Pemanfaatan Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa dialokasikan kepada desa secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang ditentukan oleh 3 (tiga) faktor yaitu :

- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur;
- c. Aksesibilitas/transportasi.

pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penggunaan Dana Desa di dasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keadilan
- b. Kebutuhan prioritas
- c. Kewenangan desa
- d. Partisipatif
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa, dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa:
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) selokan;
 - c) tempat pembuangan sampah;
 - d) gerobak sampah;
 - e) kendaraan pengangkut sampah;
 - f) mesin pengolah sampah; dan
 - g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - a) jalan pemukiman;
 - b) jalan poros desa;
 - c) jalan desa antara pemukiman ke wilayah pertanian;
 - d) jalan desa antara pemukiman ke lokasi wisata;
 - e) jembatan desa;
 - f) gorong-gorong;
 - g) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :

- a) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - b) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - c) instalasi biogas;
 - d) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - e) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- a) Jaringan internet untuk warga desa;
 - b) Website desa;
 - c) Peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d) Telepon umum;
 - e) Radio Single Side Band (SSB); dan
 - f) Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar antara lain:
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
 - a) air bersih berskala desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu; dan
 - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;

- e) taman belajar keagamaan;
- f) bangunan perpustakaan desa;
- g) buku/ bahan bacaan;
- h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i) sanggar seni;
- j) film dokumenter;
- k) peralatan kesenian; dan
- l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa :

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) irigasi desa;
 - d) kolam ikan;
 - e) kapal penangkap ikan;
 - f) tambak garam;
 - g) kandang ternak;
 - h) mesin pakan ternak;
 - i) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - j) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, lumbung desa;
 - b) gudang pendingin (cold storage); dan
 - c) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) Mesin jahit;
 - b) Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pasar desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko online;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) ruang penginapan;

4. Kondisi Geografis

Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Sindurejo, yang secara geografis berada di wilayah Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, jumlah total wilayah Desa Sindurejo seluas 881,833 ha, seluas 329 ha (37,31%) merupakan sawah tadah hujan, seluas 211 ha (23,93%) merupakan tegalan, seluas 168 ha (19,05%) merupakan Pekarangan/bangunan, seluas 1 ha

(0,11%) merupakan tambak/kolam, seluas 100,617 ha (11,41%) merupakan hutan, seluas 72,216 ha (8,19%) merupakan lainnya,

5. Kondisi Demografi

Menurut hasil registrasi penduduk pada bulan Desember 2022 jumlah penduduk Desa Sindurejo diketahui sebesar 9.875 Jiwa, terdiri dari 5.001 jiwa laki-laki dan 4.874 jiwa perempuan, jumlah penduduk Desa Sindurejo berdasarkan jenis kelamin yaitu 5.001 (50,64%) penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 4.874 (49,36%) penduduk berjenis kelamin perempuan. *Sex Ratio* sebesar 103 adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Dilihat dari angka Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) sebesar 44 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 44 orang penduduk tidak produktif yaitu usia 0 - 14 tahun dan usia 65 tahun ke atas

6. Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Katalisator

Peran Kepala Desa sebagai Katalisator, adalah seorang pemimpin harus bisa menumbuhkan pemahaman-pemahaman dan kesadaran orang-orang yang dipimpin supaya yakin bahwa tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan semua anggota organisasi yang ada, sehingga pemerintahan yang di pimpin dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, kepala desa memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat dilihat pada tabel 1 berikut :

TABEL .1			
Kepala Desa Memberikan Bimbingan dan Arahan Kepada Masyarakat			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	5	12,50
2	Sering	19	47,50
3	Kadang-kadang	14	35,00
4	Tidak Pernah	2	5,00
Jumlah		40	100,00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 8</i>			

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 40 responden terdapat 19 responden atau 47,50% responden menyatakan kepala desa sering memberikan bimbingan dan arahan, 14 responden atau 35,00% menyatakan kadang-kadang memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat, dengan bimbingan dan arahan dari kepala desa kepada masyarakat dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, karena masyarakat mengetahui perencanaan sampai alokasi dana desa.

Kepala desa tidak hanya memberikan arahan , tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan ide/masukan dalam pemanfaatan dana desa hal ini dapat dilihat pada 2 tabel berikut :

TABEL .2			
Kepala Desa Memberikan Kesempatan Masyarakat Menyampaikan Ide / Masukan			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	6	15,00
2	Sering	16	40,00
3	Kadang-kadang	7	17,50
4	Tidak Pernah	11	27,50
Jumlah		40	100,00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 9</i>			

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 40 responden terdapat 16 responden atau 40,00% menyatakan bahwa kepala desa sering memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan ide/masukan dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengutamakan pembangunan pada wilayah yang benar-benar membutuhkan maka pembangunan di Desa Sindurejo akan merata, karena masyarakat benar-benar mengetahui kondisi lingkungan tempat tinggalnya, kepala desa bertugas melakukan survai ke lokasi desa desa yang prioritas dilakukan pembangunan, dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat melalui musyawarah desa. Untuk mengetahui kepala desa melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa dilihat pada tabel 3 berikut :

TABEL .3			
Kepala Desa Melakukan Koordinasi Dengan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	5	12,50
2	Sering	15	37,50
3	Kadang-kadang	10	25,00
4	Tidak pernah	10	25,00
Jumlah		40	100,00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 10</i>			

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa dari 40 responden terdapat 15 responden atau 37,50% responden menyatakan bahwa kepala desa sering melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa, karena koordinasi sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam kegiatan pembangunan desa.

7. Kepala Desa sebagai Fasilitator

Kepala Desa sebagai fasilitator harus mampu memberikan motivasi, dan memberi kenyamanan kepada masyarakat agar dapat bekerja dengan baik, motivasi perlu diberikan untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa secara moriil dan materiil sebagai kontribusinya kepada desa untuk membangun desa. Hal ini sangat penting untuk mendorong Kerjasama antara kepala desa dengan masyarakat desa mencapai tujuan pembangunan desa. Kemampuan Kepala desa dalam bekerjasama dapat dilihat pada table 4 berikut:

TABEL.4			
Kemampuan Kepala Desa Dalam Bekerjasama dan Mengarahkan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	4	10,00
2	Baik	21	52,50
3	Cukup Baik	13	32,50
4	Tidak Baik	2	5,00
Jumlah		40	100,00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 11</i>			

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa dari 40 responden terdapat 21 responden atau 52,5% responden menyatakan bahwa kemampuan kepala desa dalam bekerjasama dalam kategori baik Hal ini dapat dilihat bahwa Kepala Desa Sindurejo baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa dan dapat memimpin masyarakat. Hanya 2 responden atau 5 % mengatakan Kerjasama kepala desa dengan masyarakat tidak baik, disebabkan ada persepsi masyarakat yang berbeda tentang pemanfaatan dana desa, bahkan ada yang tidak mengerti tentang pemanfaatan dana desa. Kemudian untuk mengetahui persepsi kepala desa dengan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

TABEL .5			
Kesesuaian Persepsi Kepala Desa Dengan Masyarakat			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	4	10,00
2	Sesuai	20	50,00
3	Kurang Sesuai	11	27,50
4	Tidak Sesuai	5	12,50
Jumlah		40	100,00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 12</i>			

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa dari 40 responden terdapat 20 responden atau 50,00% responden menyatakan bahwa persepsi kepala desa dengan masyarakat tentang pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa sudah sesuai, kemudian 11 responden atau 27,5% responden menyatakan kurang sesuai, dan 5 orang atau 12,50 % menjawab bahwa persepsi kepala desa dengan masyarakat tentang pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa tidak sesuai, hal ini terjadi karena prioritas pemanfaatan dana desa kurang sesuai antara kebutuhan dan prioritas pembangunan yang ada di desa, untuk mengetahui kesesuaian prioritas pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dapat dilihat pada tabel 6 berikut

TABEL 6			
Kesesuaian Prioritas Kepala Desa Dengan Masyarakat			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	6	15,00
2	Sesuai	23	57,50
3	Kurang Sesuai	8	20,00
4	Tidak Sesuai	3	7,50
Jumlah		40	100,00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 13</i>			

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa dari 40 responden terdapat 23 responden atau 57,50% responden menyatakan bahwa prioritas pemanfaatan dana desa sudah sesuai antara harapan kepala desa dan masyarakat, yang mengatakan kurang sesuai 8 responden (20 %) . dan 3 responden atau 7,50 % menyatakan tidak sesuai, karena pembangunan desa yang di biaya dari dana desa tidak semuanya digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik, untuk suksesnya pembangunan agar sesuai dengan harapan, maka diperlukan Kerjasama pemerintah desa dan masyarakat.

8. Kepala Desa sebagai Pemecah Masalah

Kepala Desa sebagai pemimpin dituntut untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang di hadapi, dalam menyelesaikan masalah sebaiknya didiskusikan secara bersama agar dapat memberikan hasil yang baik, dalam menyelesaikan masalah juga diperlukan berbagai pendapat dari masyarakat, sehingga dapat diambil keputusan yang tepat dan adil terhadap berbagai masalah pembangunan desa dalam pemanfaatan dana desa Ketepatan pengambilan keputusan dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

TABEL .7			
Ketepatan Keputusan Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Tepat	6	15,00
2	Tepat	15	37,50
3	Kurang Tepat	13	32,50
4	Tidak Tepat	6	15,00
Jumlah		40	100,00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 14</i>			

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa dari 40 responden terdapat 15 responden atau 37,50% responden menyatakan kepala desa tepat dalam pengambilan keputusan dalam pemanfaatan dana desa, 13 responden atau 32,50 % menyatakan kurang tepat, dan 6 responden atau 15 % menyatakan tidak tepat, hal ini dapat dilihat pembangunan desa masih kurang bagus dan kurang efektif, untuk mengetahui efektivitas keputusan yang diambil kepala desa dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

Tabel 8.			
Efektivitas Keputusan yang Diambil Dalam Pemanfaatan Dana Desa			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Efektif	1	2,50
2	Efektif	21	52,50
3	Kurang Efektif	14	35,00
4	Tidak Efektif	5	12,50
Jumlah		40	100,00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 15</i>			

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa dari 40 responden yaitu 21 responden atau 52,50% responden menyatakan pengambilan keputusan efektif, karena pembangunan desa dapat berjalan dengan baik apabila semua elemen masyarakat dapat ikut serta menyampaikan pendapat dalam rapat/musyawarah desa, tetapi ada 14 responden atau 35 % menyatakan kurang efektif, dan 5 responden atau 12,50 % menyatakan tidak efektif, sehingga masih perlu disempurnakan dan dievaluasi supaya dapat memenuhi harapan semua pihak baik itu pemerintah desa dan masyarakat, Untuk mengetahui kemampuan kepala desa dalam menyempurnakan keputusan yang diambil dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

TABEL 9			
Kemampuan Kepala Desa Dalam Menyempurnakan Keputusan yang Telah Diambil			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat baik Baik	1	2,50
2	Baik	18	45,00
3	Kurang Baik	16	40,00
4	Tidak Baik	5	12,50
Jumlah		40	100,00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 16</i>			

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 18 responden atau 45,00% responden menyatakan kemampuan kepala desa dalam menyempurnakan keputusan yang telah diambil adalah baik, tetapi ada 16 responden atau 40 % responden menyatakan kepala desa kurang baik dalam menyempurnakan keputusan, dan 5 responden atau 12,50 % menyatakan tidak baik , karena kurang menyerap aspirasi masyarakat, oleh sebab itu masyarakat mempunyai peranan penting tidak hanya menjadi obyek melainkan juga subyek pembangunan desa.

TABEL 10			
Kepala Desa Memotivasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	5	12,5
2	Sering	15	37,5
3	Kadang-kadang	18	45,00
4	Tidak pernah	2	5
Jumlah		40	100,00
<i>Diolah Dari Pertanyaan No.19</i>			

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 18 responden atau 45,00% responden menyatakan bahwa Kepala desa kadang-kadang memotivasi masyarakat untuk pembangunan desa, yang tidak pernah ada 2 responden atau 5 % karena apabila Kepala Desa tidak aktif dalam menggerakkan dan memotivasi masyarakat maka tidak akan tercapai tujuan yang sudah direncanakan

9. Keikutsertaan/Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan

Keikutsertaan/Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dan bermusyawarah tentang Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL.11			
Keterlibatan Masyarakat Dalam Setiap Musyawarah Desa			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu Dilibatkan	9	22.50
2	Dilibatkan	19	47.50
3	Kurang Dilibatkan	9	22.50
4	Tidak Dilibatkan	3	7.50
Jumlah		40	100.00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 20</i>			

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa dari 40 responden terdapat 19 responden atau 47,50% responden menyatakan bahwa masyarakat dilibatkan dalam setiap rapat/musyawarah di Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, hanya 9 responden atau 22,5 % kurang dilibatkan dalam rapat atau musyawarah yang membahas tentang pembangunan desa, masyarakat juga berperan aktif karena mengetahui kondisi wilayah disekitarnya. Kemudian untuk mengetahui kesediaan masyarakat untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pembangunan desa dapat dilihat pada tabel12 berikut:

TABEL 12			
Kesediaan Masyarakat Dalam Pemberian Data dan Informasi			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Bersedia	10	25.00
2	Bersedia	16	40.00
3	Kurang Bersedia	11	27.50
4	Tidak Bersedia	3	7.50
Jumlah		40	100.00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 21</i>			

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 16 responden atau 40,00% responden menyatakan bahwa masyarakat bersedia memberikan data dan informasi tentang pembangunan di Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, ada 11 responden atau 27,50 % kurang bersedia memberikan informasi dan 3 responden atau 7,50 % tidak bersedia, karena tanpa data dan informasi dari masyarakat maka pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa tidak akan tepat sasaran. kemudian untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja dapat dilihat pada tabel13 berikut ini :

TABEL 13			
Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu Dilibatkan	8	20.00
2	Dilibatkan	13	32.50
3	Kurang Dilibatkan	15	37.50
4	Tidak Dilibatkan	4	10.10
Jumlah		40	100.00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 22</i>			

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa 40 responden terdapat 15 responden atau 37,50% responden menyatakan bahwa masyarakat kurang terlibat dalam penyusunan rencana kerja di Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Hal ini dapat dilihat dengan kenyataan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap penyusunan rancangan kerja masih rendah, karena masyarakat sebagian besar adalah petani, sehingga tidak ada waktu untuk mengikuti rapat /musyawarah desa. Kemudian untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam penentuan skala prioritas kebutuhan pembangunan desa dapat dilihat pada tabel 14 berikut :

TABEL 14			
Masyarakat Terlibat Dalam Penentuan Skala Prioritas Kebutuhan Pembangunan Desa			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu Terlibat	5	12.50
2	Terlibat	13	32.50
3	Kurang Terlibat	17	42.50
4	Tidak Terlibat	5	12.50
Jumlah		40	100.00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 23</i>			

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa dari 40 responden terdapat 13 responden atau 32,50 % terlibat dalam penentuan prioritas kebutuhan pembangunan desa, 17 responden atau 42,50% responden menyatakan bahwa masyarakat kurang terlibat dalam penentuan skala prioritas kebutuhan pembangunan desa di Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, karena masyarakat kurang aktif ikut serta penentuan skala prioritas kebutuhan pembangunan desa sehingga , Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilihat pada tabel 15 berikut :

TABEL 15			
Masyarakat Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan Desa			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu Terlibat	4	10.00
2	Terlibat	14	35.00
3	Kurang Terlibat	19	47.50
4	Tidak Terlibat	3	7.50
Jumlah		40	100.00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 24</i>			

Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 19 responden atau 47,50% responden menyatakan bahwa masyarakat kurang terlibat dalam pengambilan keputusan prioritas kebutuhan pembangunan desa ,ada 14 responden atau 35,00 % responden terlibat dalam pengambilan keputusan, dan ada 3 responden atau 7,50 % tidak terlibat, masyarakat desa sindurejo kurang aktif dalam musyawarah, karena mayoritas masyarakatnya petani sehingga tidak ada waktu untuk hadir pada rapat musyawarah desa.

10. Keikutsertaan/Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa sangat diharapkan dapat mensukseskan program-program yang ada di desa, karena tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini :

TABEL 18			
Keaktifan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Aktif	7	17.50
2	Aktif	15	37.50
3	Kurang Aktif	17	42.50
4	Tidak Aktif	1	2.50
Jumlah		40	100,00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 25</i>			

Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui bahwa dari 40 responden terdapat 17 responden atau 42,50 % kurang aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa , kemudian yang aktif hanya 15 responden atau 37,50 % responden, keaktifan masyarakat dengan memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian dan ketrampilan dalam pembangunan dapat dilihat pada tabel 19 berikut :

TABEL 19			
Kesediaan Masyarakat Dalam Memberikan Sumbangan Pikiran, Keahlian dan Ketrampilan			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Bersedia	5	12.50
2	Bersedia	19	47.50
3	Kurang Bersedia	14	35.00
4	Tidak Bersedia	2	5.00
Jumlah		40	100.00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 26</i>			

Berdasarkan tabel 19 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 19 responden atau 47,50% responden menyatakan bahwa masyarakat bersedia memberi sumbangan pikiran, keahlian, maupun ketrampilan , 14 responden atau 35 % tidak bersedia , karena tidak mempunyai pengalaman, Pendidikan dan ketrampilan yang memadai, untuk mengetahui kesediaan masyarakat dalam memberikan sumbangan berupa uang, materi dan bahan-bahan dapat dilihat pada tabel 20 berikut ini :

TABEL 20			
Kesediaan Masyarakat Dalam Memberikan Sumbangan Uang, dan Materi			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Bersedia	4	10.00
2	Bersedia	15	37.50
3	Kurang Bersedia	13	32.50
4	Tidak Bersedia	8	20.00
Jumlah		40	100.00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 27</i>			

Berdasarkan tabel 20 dapat diketahui bahwa dari 40 responden terdapat 15 responden atau 37,50% responden menyatakan bahwa masyarakat bersedia memberi sumbangan berupa uang, materi dan bahan-bahan, dan 13 responden atau 32,50 % kurang bersedia karena tidak mampu secara ekonomi. Masyarakat mempunyai tanggung jawab memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang dari dana desa , hal ini dapat dilihat pada tabel 21 berikut ini :

TABEL 21			
Masyarakat Bersedia Dalam Melestarikan Hasil Pembangunan			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Bersedia	5	12.50
2	Bersedia	16	40.00
3	Kurang Bersedia	9	22.50
4	Tidak Bersedia	10	25.00
Jumlah		40	100.00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 31</i>			

Untuk mengetahui tinggi rendahnya skor pada Variabel Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Independen , maka peneliti menggolongkan Analisa persentase Skor yang dicapai sebesar 1.993, sedangkan skor yang diharapkan sebesar 3.040 sehingga diperoleh nilai pencapaian Variabel Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Independen . Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan nilai Variabel Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Independen tergolong kategori Sedang.

TABEL 22			
Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Juklak dan Juknis			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	6	15,00
2	Sesuai	23	57,50
3	Kurang Sesuai	7	17,50
4	Tidak Sesuai	4	10,00
Jumlah		40	100,00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 42</i>			

Berdasarkan tabel 22 dapat diketahui dari 40 Orang responden yaitu 23 responden atau 57,50% responden menyatakan bahwa Pelaksana kegiatan sudah sesuai dengan juklak dan juknis dan 7 responden atau 17,50% menyatakan kurang sesuai, kemudian 6 responden atau 15,00% responden menyatakan sangat sesuai, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai akan menimbulkan penyelewengan dan kekacauan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian untuk mengetahui apakah hasil pembangunan sesuai dengan yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 23			
Pembangunan Sesuai Dengan Yang Direncanakan			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	6	15,00
2	Sesuai	22	55,00
3	Kurang Sesuai	10	25,00
4	Tidak Sesuai	2	5,00
Jumlah		40	100,00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 43</i>			

Berdasarkan tabel 23 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 22 responden atau 55,00% responden menyatakan bahwa Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan yang direncanakan dan 10 responden atau 25,00% kurang sesuai dengan yang direncanakan hal ini karena pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan hanya pada pembangunan fisik saja, kemudian 6 responden atau 15,00% responden menyatakan sangat sesuai dengan yang direncanakan, sehingga pembangunan desa dapat bermanfaat untuk masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari peran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Untuk mengetahui Tim ini bekerja sesuai SOP dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 24			
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bekerja Sesuai Dengan SOP			
No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	10	25,00
2	Sesuai	14	35,00
3	Kurang Sesuai	11	27,50
4	Tidak Sesuai	5	12,50
Jumlah		40	100,00
<i>Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 46</i>			

Bahwa Skor yang diharapkan sebesar 1.600, sedangkan skor yang dicapai sebesar 1.066 sehingga diperoleh nilai pencapaian Variabel Pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan desa Sebagai Variabel dependen . Sebesar 66,625%. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan nilai Variabel Pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan desa Sebagai Variabel dependen tergolong kategori Sedang.

KESIMPULAN

Kepemimpinan Kepala Desa Di Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dari hasil penelitian termasuk dalam kategori Sedang, hal ini dapat dilihat dari nilai pencapaian variabel Kepemimpinan Kepala Desa , Berdasarkan perhitungan Bahwa Skor yang diharapkan sebesar 1920, sedangkan Skor yang dicapai sebesar 1212 sehingga diperoleh nilai pencapaian Variabel Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Variabel Independen sebesar 63,125%.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan «Ada Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Desa di Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan» dinyatakan diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sihotang. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan. FISIP UI. Depok.
- Arikunto. 2005. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bernadine R. dan Susilo Suparjo. 2006. Kepemimpinan : Dasar-dasar. Pengembangannya. Andi Offset, Yogyakarta.
- H.A.R. Tilaar. 2009. Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Rineka Cipta. . Jakarta. Heidjrachman dan Husnan, Suad. 2002. Manajemen Personalia. Penerbit : BPFU UGM. Yogyakarta. Hamalik, oemar. 2001. Pengembangan sumberdaya manusia manejemen pelatihan Ketatanegaraan; pendekatan terpadu jakarta : Bumi Aksara Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. LP3ES. Yogyakarta.
- Masri Singarimbun 1989. Pokok – Pokok Pembangunan Masyarakat Desa, PT. Citra Aditya, Jakarta.
- Moh. Nazir, Ph.D. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rivai, Veithzal. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, dari Teori ke Praktik. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2000. Administrasi Pembangunan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2008. Administrasi Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siti Irene Astuti D. 2009. Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan. UNY. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2008. Teknik Penelitian. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R & D. Alfabeta. Bandung.
- Sumadi Suryabrata. 2003. Metode Penelitian. Rajawali. Jakarta.
- Sumampouw, Monique. 2004. Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif. Jacub Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suwatno. 2001. Asas-Asas Manajemen Sumber Daya Manusia. Suci Press. Bandung.
- Tjiptono, Fandy & Anastasia Diana. 2003. Total Quality Management. Andi. Yogyakarta.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.